

# **BUDAYA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT YANG TERGANTIKAN OLEH BUDAYA KEKERASAN**

## **ABSTRAK**

Makalah ini membahas tentang budaya musyawarah untuk mufakat yang tergantikan oleh budaya kekerasan. Fenomena kekerasan diawali sejak runtuhnya rezim Orde Baru dan menjadi semakin marak terjadi di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Setiap persoalan dan konflik yang terjadi di bangsa Indonesia hampir setiap waktu diselesaikan dengan kekerasan. Budaya ‘musyawarah untuk mufakat’ pun yang merupakan semboyan hidup bermasyarakat bagi bangsa Indonesia perlahan mulai tergantikan oleh budaya kekerasan. Untuk itu perlu adanya suatu upaya lebih lanjut untuk memutus rantai kekerasan di masyarakat yaitu dengan mengetahui apa penyebab dari maraknya kekerasan dan mengupas kembali keberadaan Pancasila sebagai dasar negara yang membahas tentang permusyawaratan melalui sila ke 4. Bangsa Indonesia tampaknya perlu meninjau ulang dan meresapi dengan khidmat tentang arti dari dasar negara yaitu Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Budaya musyawarah untuk mufakat yang mulai terlupakan oleh bangsa ini tampaknya perlu dihidupkan kembali semangatnya dalam setiap jiwa masyarakat Indonesia. Agar pada saat menghadapi masalah, bukan kekuatan fisik dan emosi yang diutamakan tetapi budaya musyawarah yang mencerminkan budi pekerti yang tinggi. Pentingnya menanamkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat menjalani kehidupan tanpa bantuan dari manusia lain. Diharapkan dapat membuat masing-masing individu saling menghargai keberadaannya satu sama lain. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran yang komprehensif bagi seluruh lapisan bangsa Indonesia untuk menyalakan kembali budaya “musyawarah untuk mufakat” dalam memutus rantai kekerasan. Apabila ini sudah terlaksana, maka kehidupan yang nyaman, tentram dan dinamis dengan menghargai keberadaan satu sama lain akan dapat terwujud dengan lebih baik.

## **PENDAHULUAN**

Beberapa tahun yang lalu sepertinya bangsa Indonesia tidak terlalu asing dengan istilah atau semboyan “musyawarah untuk mufakat”. Semboyan ini menjadi landasan yang dibudayakan dalam teknik menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi di organisasi atau lapisan masyarakat manapun. Namun, sejak runtuhnya rezim orde baru beberapa tahun yang lalu ternyata gelombang kekerasan menjadi titik awal dan makin lama semakin marak berkembang di Indonesia terutama bila ada kebijakan yang dirasa tidak bisa diterima secara akal, seperti kekerasan terhadap etnis minoritas, wanita, dan pihak lemah lainnya, sehingga membuat banyak pihak bertanya-tanya mengapa harus selalu terjadi kekerasan setiap negeri ini mengalami proses transisi ([www.asmamalaikat.com](http://www.asmamalaikat.com), diakses tanggal 28 Mei 2011).

Pertanyaan berikutnya yang muncul untuk menanggapi maraknya fenomena kekerasan di Indonesia adalah kemana perginya semboyan “musyawarah untuk mufakat” yang selama berpuluh tahun telah membudaya dan berakar di Indonesia.

Masih jelas di ingatan tentang pertikaian berdarah yang terjadi antara Satpol PP dengan warga di daerah Jakarta Utara. Kekerasan yang memakan korban aparat dan warga kembali

menjadi pilihan saat sekitar dua ribu polisi pamong praja mencoba menggusur kompleks makam Mbah Priok di Jakarta Utara. Permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin justru dihadapi dengan kekerasan yang berujung pada jatuhnya korban nyawa (Adam, 2010).

Fenomena kekerasan diatas merupakan salah satu dari sekian banyak kekerasan yang terjadi di Indonesia. Fenomena tersebut menjelaskan tentang adanya jurang pemisah antara aparat dan masyarakat. Bagi Satpol PP, kewajiban menjalankan perintah akan berdampak pada jatuhnya sanksi administrasi hingga pemecatan jika tidak menjalankan perintah. Hal ini semakin membuat Satpol PP atau aparat tidak memiliki pilihan dalam menjalankan tugasnya (Geovanie, 2010). Sementara itu, bagi masyarakat, menyampaikan aspirasi adalah bentuk dari kebutuhan yang belum terpenuhi oleh pemerintah. Sehingga masyarakat dan aparat sama-sama tidak mempunyai pilihan dalam menyalurkan dan menerima aspirasi.

Perilaku kekerasan yang semakin hari semakin nampak dan sangat mengganggu ketentraman hidup masyarakat dan negara, akan semakin membudaya apabila hal ini tidak ditanggapi dan tidak ada upaya sistematis untuk mencegahnya. Akibatnya, tidak mustahil bangsa Indonesia akan merugi karena berkembangnya budaya kekerasan (Wibisono, 2009).

Maraknya konflik dan kekerasan juga dipahami sebagai salah satu akibat dari semakin berjaraknya antara elit politik dan masyarakat. Sistem politik yang ada tidak menjadikan saluran-saluran komunikasi politik berjalan dengan sehat. Masyarakat kehilangan saluran untuk berkomunikasi dan menyampaikan suara dan aspirasi politiknya sebagai usaha untuk menciptakan politik dan masyarakat yang demokratis. Konflik dan kekerasan kemudian digunakan oleh masyarakat menjadi semacam sakuran komunikasi di masyarakat (Yearry, 2011).

Fenomena ini harus diterima sebagai suatu kritik yang harus diterima oleh semua pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Budaya musyawarah yang dahulu berkembang menjadi satu tatanan kehidupan yang membuat terciptanya kedamaian hendaknya perlu dikaji ulang. Untuk mengingatkan bangsa Indonesia bahwa bangsa ini sesungguhnya memiliki martabat luhur ketika berhadapan dengan konflik. Pertanyaan yang muncul dalam makalah ini adalah mengapa akhir-akhir ini budaya tersebut menghilang tanpa disadari dan tergantikan begitu saja oleh budaya kekerasan yang tiada henti.

## **PEMBAHASAN**

Kekerasan menurut kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Kekerasan dapat juga diartikan sebagai sebuah perilaku yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Tinarbuko, 2011).

Menurut Adam (2010), kekerasan secara umum dipahami sebagai tindakan, perilaku, atau keadaan social yang mengakibatkan individu atau kelompok lain menderita, sengsara, terluka bahkan meninggal dunia. Kekerasan selalu dipandang sebagai tindakan atau perbuatan yang tidak bermoral, tidak manusiawi, dan merusak tatanan kehidupan manusia.

Belakangan ini kekerasan hampir dapat dijumpai di berbagai tempat dalam situasi apapun. Masyarakat dan aparat cenderung mengutamakan emosi daripada hati yang tenang ketika dihadapkan pada masalah. Secara perlahan kekerasan menjadi budaya yang tidak sadar telah mengilhami perilaku masyarakat, sehingga budaya kekerasan mau tidak mau berkembang dengan cukup pesat.

Menurut Raharjo (1999), istilah budaya kekerasan adalah sebuah *contradiction in terminis* yang berarti bahwa “kekerasan telah membudaya”. Maksudnya adalah bahwa kekerasan telah menjadi perilaku umum. Bahkan frekuensi pemberitaan di media massa semakin mempertegas bahwa gejolaknya sangat terlihat di masyarakat. Tindak kekerasan bisa dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Kekerasan yang dilakukan secara kolektif lebih berbahaya dibandingkan kekerasan yang dilakukan secara individual. Karena, selain jumlah pelakunya lebih banyak, juga karena efek yang ditimbulkan lebih destruktif.

Meskipun menyakitkan, bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa memang kekerasan merupakan bagian dari budaya masyarakat. “Budaya” didefinisikan sebagai tindakan atau kegiatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan serta dianut oleh kelompok masyarakat tertentu. Budaya kekerasan ini akhirnya tertanam sebagai pola pikir masyarakat. Banyak masalah yang diselesaikan dengan kekerasan, seperti kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adu jotos, dan pengadilan massa bagi pencopet, penjambret, maling, dan mungkin sebentar lagi bagi para koruptor. Bahkan di tingkat birokrasi, wakil rakyatpun adu jotos dalam ruangan (Masmeka, 2010).

Pendapat diatas semakin menegaskan bahwa kekerasan telah membudaya di negara Indonesia. Ada beberapa hal yang menyebabkan masyarakat mudah melakukan kekerasan. Pertama dimensi idiologis. Dimensi idiologis sangat mudah membakar kelompok-kelompok masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang sesungguhnya tidak pantas dilakukan. Dan karena semangat idiologis itulah muncul perilaku yang justru melawan aturan-aturan agama. Seperti yang diketahui, bahwa dalam aturan agama semestinya perbedaan dilakukan dengan mengajak orang berbicara, berdialog. Tapi itu tidak terjadi, yang terjadi justru menganjurkan seseorang untuk melakukan kekerasan.

Lalu yang kedua adalah dimensi sosiologis. Masyarakat Indonesia tidak dilatih, tidak terbiasa untuk bersikap toleran. Individu atau kelompok mau memperjuangkan sesuatu dengan mengalahkan seseorang melalui cara apapun. Padahal sebenarnya yang betul adalah dialog. Dan itu bisa ditumbuhkan mulai dari keluarga. Di Indonesia, keluarga umumnya tidak lagi menjadi basis untuk membina anak-anak. Anak-anak lahir dengan sendirinya dan lebih banyak dipengaruhi oleh interaksi dari luar. Apalagi bagi keluarga yang datang dari kalangan bawah. Kalangan bawah justru lebih kompleks, karena desakan kehidupan orang tua menjadi kurang peduli dengan anak-anaknya. Yang lebih banyak mempengaruhi adalah lingkungan, apabila lingkungannya kekerasan, maka sang anak akan menjadi individu yang mengagungkan kekerasan, dan sebaliknya. Selain itu, dimensi ekonomi juga turut mendorong seseorang melakukan kekerasan. Mengapa demikian, karena individu yang tidak memiliki pekerjaan mudah diajak melakukan sesuatu apalagi jika diiming-imingi dengan uang, sehingga individu tanpa berpikir panjang mau melakukan kekerasan. Hal ini juga diperparah

dengan tidak adanya pembinaan dari lingkungan masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi-organisasi termasuk partai politik dan pemerintah (Tanjung, 2011).

Bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian sebagai kunci utama dalam mencegah kekerasan adalah dengan mengadakan dialog. Seperti yang dianjurkan dalam Pancasila terutama sila ke 4 yang diwujudkan melalui budaya “musyawarah untuk mufakat” yang secara tidak sadar mulai terlupakan oleh bangsa Indonesia. Padahal, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ketika dasar negara sudah mulai terlupakan, maka akibatnya adalah bangsa Indonesia mulai tidak terkendali dalam menghadapi permasalahan sehingga terjadilah kekerasan.

Dalam perspektif Jawa, sudah menjadi ketetapan adat manakala seseorang sedang ditimpa masalah, maka penyelesaian masalahnya didekati dengan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Leluhur orang Jawa mengajarkan bahwa “*yen ana rembug dirembug, nanging olehe ngrembug kanthi sareh*”. Apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu jika sedang menghadapi masalah yang menyebabkan salah pengertian antar para pihak, maka marilah diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang (Tinarbuko, 2011).

Bangsa Indonesia tampaknya perlu meninjau ulang dan meresapi dengan khidmat tentang arti dari dasar negara yaitu pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Budaya musyawarah untuk mufakat yang mulai terlupakan oleh bangsa ini tampaknya perlu dihidupkan kembali semangatnya dalam setiap jiwa masyarakat Indonesia. Agar pada saat menghadapi masalah, bukan kekuatan fisik dan emosi yang didahulukan tetapi budaya musyawarah yang mencerminkan budi pekerti yang tinggi.

Pentingnya menanamkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat menjalani kehidupan tanpa bantuan dari manusia lain. Diharapkan dapat membuat masing-masing individu saling menghargai keberadaannya satu sama lain.

Akhirnya, sebuah kata-kata bijak yang diungkapkan oleh Amstutz (dalam Adam, 2010) “ingatan bagi korban kekerasan bukan hanya sekedar rekaman sebuah peristiwa, melainkan juga bentuk penagihan atas masa lalu yang pernah dideritanya sangat diperlukan untuk mendudukan persoalan pada tempatnya untuk memulai hidup baru yang terbebas dari dendam sejarah”. Ingatan akan hal ini perlu disampaikan kepada generasi selanjutnya agar dapat belajar untuk memahami derita akibat kekerasan yang menimpa orang lain. Berlapang dada memaafkan masa lalu dan berupaya memutus kekerasan dengan menciptakan peradaban yang anti kekerasan adalah salah satu cara yang dapat ditempuh.

## **PENUTUP**

Kesimpulan yang bisa ditarik dalam penulisan makalah ini adalah saat ini harus diakui bahwa budaya kekerasan mulai menggantikan keberadaan budaya “musyawarah untuk mufakat” yang dulu dijadikan pedoman hidup oleh bangsa Indonesia melalui dasar negara yaitu Pancasila.

Kekerasan menjadi hal yang biasa karena berlangsung secara terus menerus dan terjadi setiap saat, sehingga manusia menjadi tidak peka bahkan menjadi mati rasa terhadap gejala tersebut. Tindakan-tindakan kekerasan kemudian dianggap sebagai suatu kewajaran. Ketidakpercayaan yang timbul akibat tindakan oknum aparaturnegara, juga menciptakan rasa tidak aman di sebagian kalangan masyarakat. Rasa aman yang semestinya dijamin oleh negara ternyata tidak didapatkan. Ini menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat kemudian merasa perlu untuk menjaga diri (Adam, 2010).

Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran yang komprehensif bagi seluruh lapisan bangsa Indonesia untuk menyalakan kembali semboyan budaya “musyawarah untuk mufakat” dalam memutus rantai kekerasan melalui dialog. Apabila ini sudah terlaksana, maka kehidupan yang nyaman, tentram dan dinamis dengan menghargai keberadaan satu sama lain akan dapat terwujud dengan lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adam, Fiqri Yuda. 2010. “Tren Budaya Kekerasan di Indonesia : Refleksi Tragedi Satpol PP dan Ormas”. [www.fiqriyuda.blog.ugm.ac.id](http://www.fiqriyuda.blog.ugm.ac.id), diakses pada tanggal 1 Juni 2011.

Geovanie, Jeffrie. 2010. “Memahami Fenomena Kekerasan”. [www.bataviase.co.id](http://www.bataviase.co.id), diakses pada tanggal 31 Mei 2011.

Masmeka. 2010. “Apakah Kekerasan Merupakan Budaya Indonesia?”. [www.budaya.arisme.com](http://www.budaya.arisme.com), diakses pada tanggal 1 Juni 2011.

Raharjo, M Dawam. 1999. “Tantangan Indonesia sebagai Bangsa ; Esai-esai Kritis Ekonomi, Sosial, dan Politik. Yogyakarta : UII Press.

Tinarbuko, Sumbo. 2010. “Fenomena Kekerasan”. [www.sumbo.wordpress.com](http://www.sumbo.wordpress.com), diakses pada tanggal 28 Mei 2011.

Tanjung, Darman. 2011. “Utamakan Membangun Dialog”. [www.majalahforum.com](http://www.majalahforum.com), diakses pada tanggal 29 Mei 2011.

Wibisono, Gunawan. 2009. “Pengertian Kekerasan”. [www.asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com](http://www.asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com), diakses pada tanggal 1 Juni 2011.

[www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id), diakses pada tanggal 31 Mei 2011. “Faktor Penyebab Kekerasan dan Trafficking antara lain Kemiskinan dan Pengangguran”.

Yearry, 2011. “Berita Konflik : Suatu kritik Peran Media sebagai Ruang Publik dan Pilar Demokrasi”. [www.yearrypanji.wordpress.com](http://www.yearrypanji.wordpress.com), diakses pada tanggal 1 Juni 2011.

[www.suaramuhhibbudin.blogdetik.com](http://www.suaramuhhibbudin.blogdetik.com), diakses pada tanggal 1 Juni 2011. “Kekerasan Bukan Bersumber dari Agama”.

## **Identitas Penulis**

Nama : Luh Putu Shanti Kusumaningsih, S Psi, MPsi  
Pekerjaan : Staf Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang  
No. Hp : 08179564216 / 085741516158